

**PENGARUH PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YANG BERBASIS
SEJARAH TERHADAP SIKAP NASIONALISME SISWA KELAS VI MI THORIQUL HUDA
SOKOGUNUNG KENDURUAN TUBAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

SKRIPSI

**Oleh
SRI SEDANI
NIM: 15220006**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
YANG BERBASIS SEJARAH TERHADAP SIKAP NASIONALISME
SISWA KELAS VI MI THORIQUH HUDA SOKOGUNUNG
KENDURUAN TUBAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

Oleh
SRI SEDANI
NIM: 15220006

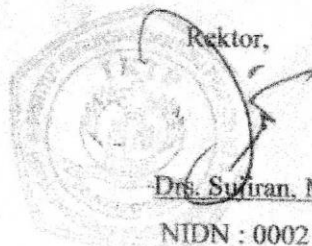
Telah dipertahankan di depan DewanPenguji
Pada tanggal 20 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima
sebagai kelengkapan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Dewan Penguji

Ketua : Drs. Heru Ismaya, M.H.
Sekretaris : Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H.
Anggota : 1. Drs. Heru Ismaya, M.H.
2. Dr. Ifa Khoiria Ningrum, M.M.
3. Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengesahkan :

Rektor,

Drs. Sujiran, M. Pd.
NIDN : 0002106302

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Berbicara tentang Indonesia, tentu banyak sekali hal yang perlu dan penting kita catat, terutama mengenai perkembangan Indonesia dari masa ke masa. Indonesia adalah bangsa yang besar, yang didalamnya terdapat beraneka ragam etnis, suku, ras, agama, hingga budaya. Tidak hanya itu, Indonesia adalah negara yang kaya raya. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, baik kekayaan alam hayati maupun nonhayati.

Dilihat dari aspek geografis, dari Sabang sampai Merauke, terbentang tidak sedikit pulau yang ada di Indonesia. Terdapat pulau besar dan pulau kecil mulai dari pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Irian Jaya dan sebagainya yang mengelilingi alam Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang sangat besar.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat melahirkan beraneka ragam budaya. Keragaman (pluralitas) tersebut menjadikan Indonesia unik dan menarik untuk dikaji dari berbagai segi, terutama segi historisnya. Sisi histories (sejarah) sebuah bangsa akan tercermin mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan berbangsa (dalam hal ini Indonesia) berkembang dari masa ke masa. Mulai dari peradaban yang paling primitif (prasejarah) hingga peradaban yang paling moderen pada abad millenium ini. Dalam rentang waktu (dari era prasejarah ke era millenium) yang sangat panjang, tentu banyak hal (peristiwa) yang telah terjadi tersebut merupakan peristiwa bersejarah yang patut diabadikan dan dijadikan pelajaran bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda tidak boleh lupa akan sejarah (JAS MERAH) kita harus mengenal dan memahami sejarah yang terjadi di Indonesia sejak zaman prasejarah

sampai modern, dan bagaimana perjuangan para pahlawan kita untuk memerdekakan kemerdekaan negara Indonesia yang tercinta ini.

Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental dan spritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik, patriotik dan menumbuhkan semangat nasionalisme. Semangat perjuangan bangsa inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk mempertahankan dan berpartisipasi mengisi kemerdekaan. Dalam dinamika kehidupan, masyarakat peningkatan rasa nasionalisme, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mencerminkan sikap cinta tanah air dan rasa nasionalisme. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut antara lain melalui pendidikan formal.

Hal ini sejalan dengan sistem pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (UUSPN) yang dinyatakan : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, dan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak yang mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab “ (SISDIKNAS, Bab 2 pasal 3)”

Permasalahan yang dihadapi dalam berlangsungnya pendidikan adalah kurangnya makna dan pembentukan semangat nasionalisme siswa yang mengakibatkan lunturnya kesadaran akan makna dari kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Jika hal ini dibiarkan, lunturnya semangat nasionalisme pada siswa akan berdampak buruk dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya permasalahan tersebut, dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus dapat menumbuhkan jiwa untuk mempertebal rasa nasionalisme dan meningkatkan meningkatakan wawasan kebangsaan siswa. Isnani Murti (2008: 3) menyatakan bahwa

rasa kebangsaan atau wawasan kebangsaan merupakan salah satu bentuk rasa cinta tanah air yang melahirkan jiwa kebersamaan untuk satu tujuan yang sama. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilingkupi oleh rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan untuk mencapai cita-cita nasionalnya dan mengembangkan eksistensi kehidupannya atas dasar nilai-nilai luhur bangsa. Implementasi dan akulisasinya dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan pemikiran yang menyangkut aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan hankam, untuk membawa bangsa ke arah kehidupan yang lebih maju dan baik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dikatakan sebagai “wahana utama untuk memelihara serta menumbuhkan semangat kebangsaan karena pranata dan instusi pendidikan hakikatnya merupakan kekuatan pembangkit gerakan watak semangat kebangsaan” adanya pelaksanaan pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat memberi peran bagi pembentukan semangat nasionalisme. Pendidikan Kewarganegaraan dapat membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan mampu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengertiannya sebagai *civic education* dan *citizenship education*. *Civic education* dapat diartikan sebagai suatu pelajaran yang dirancang untuk mempersiapkan para generasi muda agar mampu berperan aktif dalam masyarakat. *citizenship education* mempunyai arti yang lebih luas, yang mencakup formal dan informal. Pendidikan Kewarganegaraan dapat disebut juga *civic education* yang artinya suatu program pendidikan yang merupakan perkembangan dan perluasan dari ilmu kewarganegaraan yang berfokus pada perluasan demokrasi politik, demokrasi

sosial, dan demokrasi ekonomi dengan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, keluarga dan masyarakat (Parji, 2010: 2).

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber Daya Manusia (PSDM), meskipun PSDM bukan hanya dilakukan melalui pendidikan, khususnya pendidikan sekolah saat ini di percaya bahwa pendidikan merupakan wahana utama untuk PSDM yang dilakukan secara sistematis, pragmatis dan berjenjang. Dalam konteks inilah pendidikan akan semakin menuntut peran seorang guru/pengajar yang berkualitas. Untuk dapat menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas sesuai amanat UUSPN.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang sedang berusaha meningkatkan peranan pendidikan dan pemerataan pendidikan. Kebijakan pendidikan dari pelita I sampai pelita VI diarahkan pada terciptanya pemerataan dan keadilan dalam pendidikan, khususnya guru di tuntut untuk menambah serta meningkatkan kualitas dirinya melalui jalur pendidikan yang telah disediakan pemerintah, misalnya Universitas Terbuka atau yang sejenisnya, baik melalui swadana maupun proyek-proyek pemerintah.

Pendidikan tambahan yang ditempuh oleh sebagian besar guru, diharapkan mampu meningkatkan kualitas guru. Kualitas guru yang meningkatkan akan memberikan dasar untuk menciptakan suasana proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Motivasi belajar anak lebih meningkat yang akhirnya dapat membantu peningkatan prestasi belajar dan moral anak didik.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh pelajaran PKn yang berbasis sejarah terhadap sikap nasionalisme siswa MI Thoriqul Huda Sokogunung Kenduruan Tuban tahun pelajaran 2018/2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimana pengaruh pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis sejarah terhadap nasionalisme siswa ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- Untuk mengetahui pengaruh pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis sejarah terhadap nasionalisme siswa

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dan teori-teori serta menjadi bahan kajian bagi penelitian yang sejenis.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi guru dan tokoh masyarakat untuk membangkitkan semangat siswa khususnya guru dan masyarakat umumnya mengenai sikap nasionalisme.

E. Definisi operasional

Pendidikan kewarganegaraan istilah Pendidikan Kewarganegaraan yang disingkat (PKn), merupakan terjemahan dari istilah” *civic education*” yang diartikan sebagai program pendidikan yang berfungsi untuk membina kesadaran warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan jiwa dan nilai konstitusi yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Sejarah adalah babad, hikayat, riwayat, tarikh atau tambo dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau asal-usul (keturunan) silsilah, terutama bagi raja-raja yang memerintah.

Sikap adalah predisposisi atau kesiapan untuk memberi jawaban. Sikap sebagai predisposisi belum merupakan tindakan, tetapi baru merupakan kesiapan dan baru diamati dalam bentuk tutur kata atau perilaku apabila telah mendapatkan rangsangan dari luar.

Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus di letakkan kepada negara (A.J. Sumarno, 1992 : 11).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pengaruh

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua (1997:747), kata pengaruh yakni “ daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seorang”.

Pengaruh adalah “ daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang” (Depdikbud 2001:845)

WJS Poerwardaminta berpendapat bahwa pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuau, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain. (Poerwardaminta: 731).

Bila ditinjau dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada.

2. Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)

Menurut Soedijarto : Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan pilitik yang bertujuan untuk membanu peserta didik untuk menjadi warganegara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Sedangkan Menurut Suparlan : Istilah Pendidikan Kewarganegaraan yang disingkat (Pkn), merupakan terjemahan dari istilah “ *civic education* ” , yang diartikan sebagai program pendidikan yang berfungsi untuk membina kesadaran warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya jiwa dan nilai konstitusi yang berlaku di negara yang

bersangkutan menurut Suparlan . Untuk Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konsep kesadaran dalam warga negara merupakan proses psikologis yang memerlukan tahapan sesuai dengan kadar dan kemampuan seorang warga negara, yaitu berangkat dari sebuah ketidaktahuan menjadi tahu, yang kemudian tumbuh kesadaran. Kendati demikian persoalan sering muncul terkait kesadaran ini.

Tujuan program menekankan garapannya pada upaya pembentukan warga negara yang baik (*good of citizenship*) sesuai dengan jiwa dan nilai Pancasila dan UUD 1945, sebagai norma dan parametrik nasional Indonesia.

Kriteria warga negara yang baik dapat digali dari beberapa kualitas kepribadian sebagai perwujudan dari potensi yang melekat pada diri seseorang warga negara. Stanley Dimond (1970), memberikan deskripsi kualitas kepribadian warga negara yang baik, meliputi beberapa atribut : (1) loyal, (2) orang yang selalu belajar , (3) seorang pemikir, (4) bersikap demokratis, (5) gemar melakukan tindakan kemanusiaan, (6) pandai mengatur diri, (7) seorang pelaksana.

3. Ilmu Kewarganegaraan

Ilmu Kewarganegaraan yang disingkat (Ikn) merupakan terjemahan dari kata "*civics*" yang berarti menunjuk pada disiplin ilmu pengetahuan. Jadi Ilmu Kewarganegaraan adalah nama sebuah disiplin ilmu.

Secara etimologis (kata asal) "*civics*" berasal dari kata bahasa Latin "*civis*" yang berarti warga negara, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kawula. Sejalan dengan kata "*civis*" ada kata lain, yaitu "*cives*" yang berarti rakyat. Dari kata "*cives*" ini terjelma kata "*civius*" dikenal kata

“civile” sipil, para warga negara, penduduk, rakyat . di kata “civile” tersebut muncul dalam bahasa inggris, kata “civic” artinya mengenai warga negara atau mengenai kewarganegaraan. Dari kata “civics” ini imbul kata “Civics” sebagaimana kita kenal sekarang.

Dalam perkembangan dikenal definisi civics (Ikn) yang berbeda-beda. Untuk membantu pemahaman terhadap Ilmu Kewarganegaraan, berikut dikemukakan beberapa pengertian Civics menjadi Ilmu Kewarganegaraan.

- a. Civics mempelajari tentang pemerintahan kota dan kewajiban-kewajiban kewarganegaraan (*The advanced learner's Dictionary of Current English, 1945*). Hal ini eta dengan sejarah perkembangan demokrasi di Athena, yang kurang lebih 2500 tahun lalu sudah menyelenggarakan yang disebut dengan “negara kota” (*police*)”. Di kota Athena pada masa itu penduduk yang berumur 18 tahun bertemu beberapa kali dalam rapat besar untuk membicarakan masalah-masalah yang menyangkut Athena. Pertemuan secara langsung itu dapat dilaksanakan karena negara kota tidak begitu luas dan penduduknya tidak begitu banyak. Demokrasi demikian sering disebut dengan demokrasi langsung (*direct democracy*).
- b. Civics atau Ilmu kewarganegaraan adalah unsur atau bagian dari ilmu politik yang menyangkut hak membicarakan hak dan kewajiban warga negara (*Dictionary of Education 1956* dalam Carter Van Good).
- c. Civics atau Ilmu kewarganegaraan adalah cabang ilmu politik yang menyangkut hak-hak warga negara atau kewajiban-kewajiban kewarganegaraan (*Webster's New Collegiate, Dictionary, 1954*).

- d. Civics atau Ilmu kewarganegaraan mengatur hubungan orang-orang, warga negara dengan organisasi yang paling kecil samapai dengan organisasi paling tinggi yang disebut negara.
- e. Civics atau Ilmu kewarganegaraan adalah ilmu pengetahuan yang berbicara tentang hak dan kewajiban, yang merupakan subyek mata pelajaran di kampus (*A Dictionary Americana, 1956*).
- f. Civics atau Ilmu kewarganegaraan adalah ilmu tentang pemerintahan (*Webster's New Coneise Dictionary*).

Bertolak dari beberapa pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa Civics atau Ilmu kewarganegaraan menyangkut : (1) warga negara dengan hak dan kewajibannya, (2) pemerintahan, (3) ilmu pengetahuan (cabang ilmu politik) , (4) salah satu mata pelajaran yang diberikan di kampus, dan bahkan (5) juga ilmu yang membicarakan tentang manusia.

4. Kewarganegaraan

Secara terminologis, istilah “Kewarganegaraan” (*citizenship*), dalam berbagai hal juga sering dirancukan dengan “ilmu kewarganegaraan” (*civics*) dan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Citizenship atau kewarganegaraan membicarakan proses kejelasan status bagi seseorang untuk menjadi warga negara. Proses mencari kejelasan status dapat ditempuh secara yuridis dan sosiologi atau bahkan dilakukan dengan pendekatan formal dan material. Target akhir kajian kewarganegaraan adalah melakukan identifikasi peran warga negara dalam bidang kehidupan ideologi politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan serta religius/agama (*ipoleksosbuhankam dan religius/agama*).

Pengertian kewarganegaraan, dapat juga dielaborasi dalam Bab 1 pasal 1 (2) UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang menegaskan “kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara” dalam UU sebelumnya, pasal II Peraturan Penutup Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, yang menegaskan: “ Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dalam sesuatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagai warga negara.” Dalam kewarganegaraan, tercipta ikatan antara individu dengan negara, dimana individu secara politis dan yuridis merupakan anggota penuh dari negara dan berkewajiban untuk setia kepada negara, sebaliknya negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya.

5. Perbedaan fokus kajian dan persamaan obyek serta hubungan pendidikan kewarganegaraan, ilmu kewarganegaraan dan kewarganegaraan

Dengan memperhatikan uraian tentang konsep dasar masing-masing, perbedaan antara ketiga istilah (Pkn), (Ikn), (Kn) terletak pada substansi garapannya, di mana Kewarganegaraan lebih ditekankan pada persoalan proses kejelasan status seseorang sebagai warga negara dan identifikasi peran warga negara dalam bidang-bidang kehidupan ideologi politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbuhankan dan relegius/ agama, sementara ilmu kewarganegaraan lebih menekankan sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang melakukan kinerja secara ilmiah yang mengkaji hak dan kewajiban secara mendasar (transendental), sedangkan pendidikan kewarganegaraan lebih memfokuskan pada kedudukannya sebagai program pendidikan dan bekerja dalam lingkungan pendidikan serta target garapan pembentukan warga negara yang baik (*good of citizenship*).

Sekalipun ketiganya berbeda dalam fokus kajiannya, PKn, Ikn, dan Kn memiliki kesamaan obyek, dalam hal ini adalah manusia yang secara formal disebut dengan “warga negara” dalam kajian ini seseorang atau manusia harus ditempatkan sebagai kedudukan formal, selalu diberi ukuran sepanjang itu diakui dan disahkan oleh legalitas perundangan. Manusia warga negara adalah manusia yang secara formal telah diakui oleh Undang-Undang sebagai warga negara.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki hubungan yang erat dengan ilmu kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Beberapa kajian tentang warga negara lengkap dengan hak dan kewajibannya yang dilakukan oleh ilmu kewarganegaraan dan kajian kejelasan status dan peran warga negara dalam bidang kehidupan yang dilakukan oleh Kewarganegaraan, seluruhnya masuk menjadi materi ajar pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan. Dengan kata lain, Pendidikan Kewarganegaraan tidak bisa bicara tanpa ada Ilmu Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan.

6. Ruang lingkup kajian PKn di Kampus Dasar dan Madrasah

Ibtidaiyah (MI)

a. Latar Rasional

Program Pendidikan Kewarganegaraan erat terkait dengan program pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama dibawah satu negara yang sama*

walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. (Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998).

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara kesatuan dengan berbentuk Republik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah *negara yang berkedaulaan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.* (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)

Dalam perkembangan sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.

Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat, pemerintahan dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

b. Tujuan

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

- 1). Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2). Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti-korupsi.

3). Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

4). Berintraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

7. Ruang lingkup PKn

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi : Hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi : Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di kampus, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
- c. Hak asasi manusia meliputi : Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, pengormatan, perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara meliputi : Hidup gotong royong, harga diri sebagai wargamasyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.

- e. Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan politik meliputi : pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
- g. Pancasila meliputi : kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses erumusan pancasila sebagai dasar negara pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. Globalisasi meliputi : globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Ruang lingkup kajian Pendidikan Kewarganegaraan tersebut pada prinsipnya berlaku pada jenjang pendidikan SD,ALTP DAN SLTA. Dengan mempertimbangkan kondisi psikologis-pedagogis peserta didik, maka masing-masing jenjang menekankan pada substansi yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomer 23 Tahun 2006, tekanan lingkup kajian PKn di Kampus Dasar dapat diketahui dalam kurikulum tingkat satauam pendidikan (KTSP), yang standar kompotensi (SK) dan kompetensi dasar (KD).

8. Pengertian Sejarah

Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan itu disebut sumber sejarah. Dalam bahasa inggris kata sejarah disebut *history*, artinya masa lampau ;masa lampau umat manusia. Dalam bahasa arab sejarah

disebut sajarotun (*syajarah*), artinya pohon dan keturunan. Dalam bahasa Jerman, kata sejarah disebut *geschichte* yang artinya sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Adapun menurut Sartono Kartodirdjo, sejarah adalah rekonstruksi masa lampau atau kejadian yang terjadi pada masa lampau.

Ada tiga aspek dalam sejarah, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa yang akan datang sehingga sejarah mengandung pelajaran tentang nilai dan moral.

Pada masa kini, sejarah akan dapat dipahami oleh generasi penerus dari masyarakat yang terdahulu sebagai suatu cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan memberi kita gambaran tentang kehidupan manusia dan kebudayaannya di masa lampau sehingga dapat merumuskan hubungan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut, walaupun belum tentu setiap peristiwa atau kejadian akan tercatat dalam sejarah.

9. Pengertian Nasionalisme

Pengertian Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus di letakkan kepada negara (A.J. Sumarno, 1992 : 11). Perasaan yang sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah air, tradisi-tradisi setempat dan penguasa resi yang menguasai selalu ada di sepanjang sejarah. Setiap bangsa harus membentuk suatu negara sebagai negaranya sendiri. Secara umum suatu negara mempunyai faktor-faktor obyektif tertentu yang membuat mereka berbeda dengan bangsa lain, misalnya : persamaan, keturunan, bahasa, kesatuan adat istiadat dan tradisi. Teori nasionalisme sebagaimana

diutarakan diatas, pada dasarnya bersumber dari “Blood-undbooden theories” atau darah dan tanah yang di utarakan oleh Karl Househofer dari Jerman yang sudah ditinggalkan karena tidak cocok dengan realita (Sartono Kartodirjo, 1992: 36).

Lebih lanjut dikemukakan bahwa teori yang berkembang dan banyak dianut oleh teori yang diutarakan oleh Ernest Renan, sebagaimana dalam pidatonya yang dalam istilah Indonesia berjudul “Apakah bangsa itu ?”, diucapkan tanggal 11 Maret 1882 di Universitas Sorbone di Paris. Renan menyatakan bahwa bangsa itu soal perasaan, soal kehendak semata untuk hidup bersama yang timbul antara golongan besar manusia senasib dalam masa lampau. Teori ini menangkalkan pendapat, bahwa bangsa timbul karena persamaan keturunan atau darah, atau persamaan geografis (Sartono Kartodirjo, 1992:36).

Berbicara masalah negara, hal yang tidak bisa diabaikan adalah bangsa. Bangsa merupakan solidaritas besar, yang terbentuk dengan adanya kesadaran bahwa orang telah berkorban banyak dan bersedia untuk memberikan korban lagi. Ini mengandung arti adanya suatu waktu masa lampau, tetapi ia merasa dalam waktu yang sekarang, sebagai suatu kenyataan secara tegas untuk melanjutkan hidup bersama, yaitu suatu persetujuan keinginan yang dinyatakan secara tegas untuk melanjutkan hidup bersama. Hidup suatu bangsa adalah suatu plebisit atau keputusan rakyat demi kelangsungan hidup bangsa itu (Sartono Kartodirjo, 1992: 41).

Teori tersebut menjelang abad XX, abad kebangkitan nasional, dianut oleh bangsa-bangsa terhajah yang ingin mendapatkan kemerdekaan kembali, mempertahankan kemerdekaan dan berjuang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nasionalisme adalah suatu kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa, dengan hasrat untuk mencapai cita-cita, mempertahankan eksistensinya,

mewujudkan identitas, integritas, kemakmuran dan ketahanan bangsa. Tujuan mencapai cita-cita untuk meningkatkan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, misalnya membina identitas bangsa, mengembangkan integritas bangsa, mengembangkan ketahanan bangsa, meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran bangsa, dan usaha-usaha tersebut berdasarkan kondisi yang telah dimiliki (A.J. Sumarno, 1992: 13).

Bagi bangsa yang belum merdeka seperti Indonesia (sebelum 17 Agustus 1945), pencapaian kemerdekaan merupakan fokus perjuangan nasionalisme. Gagasan kemerdekaan merupakan jembatan emas yang telah menggena sejak tahun 1933 dan mencapai puncaknya pada tahun 1945. Disisi lain, disanalah bangsa Indonesia akan bekerja keras untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan. Diseberang jembatan emas inilah bangsa Indonesia dengan leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi (Arbi Sanit, 1988 :221).

Keyakinan bangsa Indonesia tentang mutlaknya kemerdekaan bagi suatu bangsa, tercantum dengan jelas dalam Alenia pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas Dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemansiaan dan perikeadilan (UUD 1945). Alasan bangsa Indonesia menentang penjajah, adalah karena penjajah itu bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, ini berarti bahwa setiap hal atau yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan juga secara sabar harus ditentang oleh bangsa Indonesia.

Alenia kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang

berbahagia dan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, hal ini menunjukkan kebanggaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Ini berarti adanya kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan masa lalu dan masa mendatang.

Pada tahun 1945 bangsa Indonesia sedang kuat-kuatnya berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan Pancasila yang menjadi filsafat negara Republik Indonesia, kebangsaan dirumuskan sebagai sila persatuan Indonesia merupakan sila ketiga sesudah sila Ke-Tuhan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab atau dengan kata lain nasionalisme Indonesia mengacu pada paham kebangsaan dan sila ketiga dalam Pancasila dasar negara Republik Indonesia (Arbi Sanit, 1988 : 222).

Pancasila merupakan konsensus nasional sebagai ideologi bangsa Indonesia yang mengikat bersama dalam nilai-nilai dan tujuan bersama. Pendidikan dapat memainkan peranan yang penting untuk menginternalisasikan ideologi Pancasila dalam rangka integrasi nasional.

Dari sudut ideologis, sekolah menyediakan suatu sistem institusi yang harus dilewati oleh semua siswa dan mereka akan mendapatkan sejumlah pengertian umum, tentang simbol, nilai, dan tujuan nasional. Mereka belajar menghargai bendera nasional, menyanyikan lagu kebangsaan, dan mendapatkan suatu pandangan tentang kemulyaan pahlawan-pahlawan nasional dapat dibentuk, dirumuskan, kemudian di ajarkan kepada semua anak-anak usia sekolah. Hal ini sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang menyatakan bahwa pendidikan Pancasila wajib diberikan kepada semua jenis dan jenjang sekolah baik negeri maupun swasta (Depdikbud, 1994 : 17).

Sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat, dan utuh dari Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. (Moh Hatta,1978:101), Pancasila adalah lima azas yang merupakan ideologi negara, maka kelima sila itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara kelima azas erat sekali, saling kait mengait, berangkaian dan tidak berdiri sendiri.

Bila diteliti kedudukan sila-sila dari Pancasila dalam urutan dan ketentuannya, ternyata pada tiap-tiap sila mempunyai kedudukan yang khas, yaitu sila yang kemudian merupakan pengkhususan dari sila yang sebelumnya. Sila mengandung pengertian Tuhan yang amat luas. Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu yang menjadi pokok pangkal dari segala kejadian. Tidak ada sesuatu yang menyamai. Sila kedua adalah kemanusiaan, Tuhan adalah pencipta segala yang terbentang di dunia, termasuk manusia, apabila dibanding antara sila pertama dan kedua, maka sila kedua mengandung pengertian yang lebih khusus dari pada sila pertama. Pada sila ketiga kekhususannya itu tampak lebih jelas yaitu mengenai manusia Indonesia saja, salah satu kelompok manusia yang hidup di daerah tertentu, pengelompokan dalam daerah tertentu itu sesuai dalam sifat bawaan manusia sebagai manusia sosial. Dalam kehidupan sosial, manusia pasti memerlukan aturan yang disepakati oleh para anggotanya. Bagi bangsa Indonesia cara mengatur kehidupan bersama ini didasarkan atas musyawarah dari para anggota masyarakat dan apabila tidak mungkin musyawarah tersebut diwakili oleh wakil-wakil kelompok dalam masyarakat. Itulah sila keempat pada Pancasila. Sila kelima adalah paling khusus dan tujuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian tempat sila-sila dalam urutan tidak dapat dirubah-rubah dan urutan itu adalah mutlak. Kelima sila pada

pancasila itu juga saling jiwa menjiwai satu dengan lainnya dan saling isi mengisi, tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya.

Pada masa penjajahan, nasionalisme dihadapkan pada pemerintah penjajah untuk mendapatkan kemerdekaannya kembali. Sedangkan pada masa kemerdekaan arti dan fungsi nasionalisme berkaitan dengan nilai-nilai itu berakar di bumi Indonesia yang diyakini kebenarannya dan memberikan motivasi untuk mewujudkan apa yang tersurat dan tersirat pada sila-sila Pancasila. Nasionalisme yang telah dijelaskan diatas mengacu pada sila ketiga dari Pancasila persatuan Indonesia. Sehingga penjabarannya pada indikator-indikator berdasarkan pada lima butir dari sila ketiga Pancasila tersebut, adalah :

- a. Nasionalisme menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- b. Nasionalisme rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- c. Nasionalisme cinta tanah air dan bangsa.
- d. Nasionalisme bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
- e. Nasionalisme memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika atau dengan kata lain indikator-indikator nasionalisme adalah : (a) Bersatu, (b) Rela berkorban, (c) Cinta tanah Air, (d) Bangga sebagai bangsa Indonesia, dan (e) Kerjasama (Arbi Sanit,1998: 236).

Nasionalisme bagi bangsa Indonesia sendiri merupakan ideologi atau paham yang menyatukan keinginan berbagai suku bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini disebutkan oleh Noor Ms Bakry (2008: 90) bahwa nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan dengan rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan cita-cita yang sama dalam satu ikatan organisasi kenegaraan Indonesia.

1. Sikap Nasionalisme

Berikut ini dikupas pengertian sikap yang kaitanya dengan nasionalisme. sikap adalah predisposisi atau kesiapan untuk memberi jawaban. Sikap sebagai predisposisi belum merupakan tindakan, tetapi baru merupakan kesiapan dan baru diamati dalam bentuk tutur kata atau perilaku apabila telah mendapatkan rangsangan dari luar. Dengan demikian sikap adalah kecenderungan reaksi baik yang bersifat mendukung ataupun memihak terhadap stimulus yang berupa gejala atau obyek (Syaifuddin Azwar, 1997 : 19)

Dari pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa sikap adalah merupakan konsep yang masih memerlukan jawaban baik positif maupun negatif. Bersifat positif karena menimbulkan sikap setuju dan negatif menimbulkan sikap tidak setuju. Apabila seorang dihadapkan pada obyek tertentu.

Sikap berhubungan niat untuk melakukan suatu dari perilaku seseorang (anak). Gambaran ini merupakan kesatuan faktor-faktor norma sosial. Kebiasaan-kebiasaan dimasyarakat, dan sifat-sifat kepribadian individu.

2. Kaitan sikap nasionalisme dengan prestasi Belajar.

Telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengertian nasionalisme yaitu suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diletakkan kepada negara (A.J. Sumarno, 1992:11)

Nasionalisme seperti dijelaskan diatas mengacu sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia yang meliputi indikator-indikator : (a) nasionalisme bersatu, (b) nasionalisme rela berkorban, (c) nasionalisme cinta tanah air, (d) nasionalisme bangga sebagai bangsa Indonesia, dan (e) nasionalisme kerjasama.

Kaitannya dengan proses pembelajaran di sekolah, siswa harus mendahulukan kepentingan umum (kewajiban) diatas kepentingan pribadi (hak

). Karena fokus penelitian adalah siswa terkait pembelajaran PKn yang berbasis sejarah terhadap sikap nasionalisme. Maka siswa harus dapat mengenal dan memahami sejarah dan dapat menimbulkan rasa nasionalisme siswa dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Secara garis besar, kewajiban seorang pelajar adalah belajar. Namun bila kelima indikator tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah, maka bisa diartikan: (a) nasionalisme bersatu tidak pernah membuat kelompok yang bersifat negatif atau main hakim sendiri, (b) nasionalisme rela berkorban untuk kepentingan kehidupan di sekolah kaitannya dalam proses pembelajaran, (c) nasionalisme cinta tanah air cinta sekolah tempat siswa belajar, (d) nasionalisme bangga sebagai Indonesia bila diterapkan di madrasah adalah bangga kepada madrasah tempat siswa belajar dan tidak pernah merasa kecil hati karena yang ditempati tersebut, (e) nasionalisme kerjasama meliputi kerjasama dengan teman dan guru untuk kepentingan proses belajar sehingga diharapkan prestasi belajar yang memuaskan dicapai oleh seluruh siswa.

3. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan jiwa nasionalisme bagi generasi bangsa, yaitu sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh tanggung jawab.
 - b. Meningkatkan disiplin nasional dan tanggung jawab sosial dalam rangka menumbuhkan sikap mental kesetiakawanan sosial, tenggang rasa, dan tanggung jawab.
 - c. Memelihara semangat, tekad, disiplin dan meningkatkan partisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan.

Cara lain yang bisa dilakukan dalam menerapkan prinsip nasionalisme adalah dengan cara keteladanan dan pewarisan.

1) Cara keteladanan

Keteladanan dapat diberikan di berbagai aspek kehidupan dan lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Keteladanan di lingkungan keluarga biasanya diberikan oleh ayah, ibu dan anak yang lebih tua. Contoh:

- a. Orang tua yang selalu bersikap adil kepada anak-anaknya.
- b. Orang tua yang memegang pada prinsip kebenaran.
- c. Seorang kakak yang memberi teladan dalam setiap hal.
- d. Seorang anak yang menjaga nama baik keluarga dalam sikap dan perbuatan.

Keteladanan di lingkungan sekolah biasanya diberikan oleh guru, kepala sekolah, pengurus OSIS dan pengurus kelas. Contoh :

- a. Mengikuti setiap upacara bendera yang diadakan oleh sekolah.
- b. Ikut membantu meringankan beban teman yang membutuhkan.
- c. Ikut aktif dalam gerakan pramuka.
- d. Ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

2) Pewarisan

Cara pewarisan dilakukan dengan mengadakan serangkaian kegiatan yang dapat menumbuhkan perkembangan jiwa nasionalisme pada generasi muda. Melalui kegiatan tersebut nilai-nilai nasionalisme diwariskan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti : mengunjungi tempat-tempat wisata bersejarah, mengenal perjuangan para tokoh-tokoh pahlawan, dan tapak tilas perjuangan bangsa.

Negara sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki semangat dan tekad yang tinggi, pikiran yang jernih serta sikap berani menegakkan kebenaran dalam masyarakat.

Sikap nasionalisme perlu ditanamkan sejak dini. Sejak masa kanak-kanak nasionalisme perlu diperkenalkan. Sikap nasionalisme ini dapat diwujudkan di berbagai lingkungan., baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

B. Hasil Peneliti Yang Relevan

Hasil penelitian yang terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rasimin yang “berjudul Sikap Nasionalisme siswa MI Thoriqul Huda Sokogunung Kenduruan Tuban 2007” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap nasionalisme MI Thoriqul Huda Sokogunung Kenduruan Tuban memiliki sikap nasionalisme dan kriteria yang cukup baik.

Persamaan penelitian terdahulu dengan saya teliti adalah terletak pada tujuan untuk mengetahui sikap nasionalisme siswa. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya mengetahui sikap nasionalisme sedangkan peneliti sendiri ingin mengetahui pengaruh pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis sejarah terhadap sikap nasionalisme siswa.

2. Penelitian yang relevan telah dilakukan oleh Gita Enggarwati yang berjudul “Penanaman sikap nasionalisme melalui mata pelajaran IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Sumampir” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara untuk menanamkan sikap nasionalisme melalui pelajaran IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Sumampir” antara lain dengan pembiasaan keteladanan, pemberian contoh yang kontekstual, pembelajaran melalui cerita, serta penggunaan media

seperti gambar pahlawan dan menyanyikan lagu-lagu nasional. Hal ini yang paling efektif dilakukan oleh guru untuk menanamkan sikap nasionalisme siswa.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti terletak pada tujuan yaitu penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui sikap nasionalisme siswa.

Perbedaannya terletak pada pelajaran. Sedangkan peneliti pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

C. Kerangka Berpikir

Pendidikan di sekolah dasar perlu diwujudkan melalui pembelajaran. Semua pembelajaran disekolah menitik beratkan pada tiga aspek yaitu : Pengetahuan, sikap, dan Keterampilan . Aspek Kognitif adalah suatu proses yang memiliki sifat menambah wawasan atau pengetahuan guna menambah hasil belajar. selanjutnya, sikap afektif merupakan sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan nilai (Sudijono, 2006:54)

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris (Moh.Nazir, 1998:182).Sebelum sampai pada sebuah teori yang terbukti kebenarannya, peneliti membuat hipotesis tawaran sementara

terhadap, permasalahan yang di pertanyakan sampai terbukti sebenarnya melalui data-data yang terkumpul. Secara teknis hipotesis di definisikan sebagai pertanyaan mengenai populasi yang akan di uji kebenaranyaberdasarkan data di peroleh dengan sampel penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan, pengujian data dan hipotesisnya menggunakan data statistik maka hipotesis yang diajukan meliputi hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis nihil digunakan untuk menyatakan kesamaan atau tidak adanya perbedaaan antara dua kelompok hal yang di permasalahan.

Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antara dua kelompok yang di ajukan.Maka sebagai kelanjutan dari penelitian ini dapat di rumuskan hipotesisnya sebagai berikutnya :

a. Hipotesis Alternatif (H_a)

Ada pengaruh pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis sejarah terhadap sikapnasionalisme siswa kelas VI MI Thoriqul Huda Sokogunung kenduruan Tuban.

b. Hipotesis Nihil (H_0)

Tidakadapengaruh pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis sejarah terhadap sikap nasionalisme siswa kelas VI MI Thoriqul Huda Sokogunung kenduruan Tuban.

Hipotesis nol sering juga di sebut hipotesis *statistik*, karena biasanya di pakai dalam penelitian statistik, yaitu di uji dengan perhitungan statistik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan dalam bentuk dokumen data empiris di lapangan.

Menurut sugiyono (2011:8) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan juga sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berdasarkan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah menemui kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/ empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono,2011:7).

Menurut Margono (seperti dikutip Ahmad Tanzeh, 2009:100), penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang lebih banyak menggunakan logika hipotesis kemudian melakukan pengujian di lapangan dan kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data empiris.

Sedangkan menurut Sudyaharjo (seperti dikutip Ahmad Tanzeh, 2009:100), riset kuantitatif merupakan metode pemecahan masalah yang terencana dan cermat, dengan desain yang terstruktur ketat, pengumpulan data secara sistematis terkontrol dan tertuju pada penyusunan teori yang disimpulkan secara induktif dalam kerangka pembuktian hipotesis secara empiris.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah suatu bentuk metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan dan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel X (pelajaran PKn yang berbasis sejarah) terhadap Y (sikap nasionalisme siswa). Sedangkan untuk menganalisis

pengaruh masing-masing variabel menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Alasan dipilihnya jenis penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pelajaran PKn yang berbasis sejarah terhadap sikap nasionalisme siswa kelas VI MI Thoriqul Huda Sokogunung Kenduruan Tuban. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (X) Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis sejarah dan variabel terikat (Y) sikap nasionalisme siswa

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sutrisno Hadi (1982 : 221), populasi adalah suatu obyek yang dimaksudkan untuk diselidiki. Populasi dibatasi sebagai jumlah penduduk atau individu yang sedikitnya mempunyai satu sifat yang sama sedangkan menurut Suharsini Arikunto (2010 : 173) populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan penduduk yang merupakan subyek penelitian.

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas VI MI Thoriqul Huda Sokogunung Kenduruan Tuban sebanyak 14 siswa.

2. Sampel

Menurut Arikunto (2010: 174) Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu Kelas VI sebanyak 14 siswa.

Pengambilan sampel agar benar-benar dapat mencerminkan karakteristik populasi, maka perlu ditentukan teknik pengambilan sampel yang disebut sampling. Sampling adalah cara atau teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel (Sutrisno Hadi, 1982 : 116). Penggunaan sampling dimaksudkan agar penelitian

dapat memperoleh sampel yang benar-benar representatif, artinya dapat mewakili dan mencerminkan kondisi populasi yang ada.

Teknik pengambilan sampel agar mencerminkan sifat populasi, maka teknik sampling yang digunakan adalah *sampling total*, yakni teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel total adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. (Sugiono, 2017 : 67)

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan keterangan-keterangan lainnya dalam penelitian terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik dalam pengumpulan data, yaitu metode dokumentasi dan metode angket.

1. Metode dokumentasi

Menurut Arikunto (2010: 274) metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, longger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini untuk mengetahui kondisi awal subjek yang diteliti. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan cara meminta data awal nilai hasil belajar siswa pada semester sebelumnya.

Metode dokumentasi digunakan, karena memiliki beberapa kelebihan antara lain :

- 1) Menghemat waktu karena dapat dilihat secara langsung sekaligus mencatatnya.
- 2) Statis, tidak akan berpengaruh faktor luar.

- 3) Dalam hal peristiwa masa lalu dokumen akan sangat membantu dalam pengumpulan data.
- 4) Dokumen peristiwa penting akan tersimpan dan tidak banyak memakan waktu dan biaya.

Adapun kelemahan metode dokumentasi antara lain :

- a) Format tidak baku.
- b) Seringkali data kurang lengkap.
- c) Tersedia secara selektif.
- d) Bias, dokumen dapat ditulis secara berlebihan, kadang-kadang tanpa fakta sehingga apabila dipakai sebagai acuan utama kurang mengena.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan karena peneliti ingin memperoleh data tentang nama, alamat, umur, nama orang tua, dan data lainnya yang berhubungan dengan siswa MI Thoriqul Huda Sokogunung Kenduruan Tuban.

2. Metode Angket

Pengertian angket atau kuesioner adalah suatu penyelidikan mengenai masalah yang umumnya menyangkut kepentingan umum (orang banyak), dilakukan jalan mengedarkan suatu daftar pertanyaan atau beberapa formulir yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah obyek untuk mendapatkan sejumlah jawaban atau tanggapan secara tertulis pula (Kartono, 1990 : 20)

Jadi angket adalah daftar pertanyaan untuk diisi atau dijawab oleh sejumlah orang sebagai responden guna mendapatkan tanggapan tertulis yang diperlukan dalam penelitian.

Bila dilihat dari macamnya, angket dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- 1) Angket Langsung

Angket Langsung adalah daftar pertanyaan atau formulir yang diberikan langsung pada responden yang menjadi sasaran.

2) Angket Tak Langsung

Angket Tak Langsung adalah suatu angket yang tidak langsung diberikan kepada orang yang akan diteliti tetapi lewat seseorang yang dekat dengan responden.

Sedangkan bila dilihat dari segi menjawabnya angket dibedakan menjadi 2 yaitu :

a) Angket tertutup

Angket tertutup yaitu angket yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap, sehingga pengisi hanya tinggal memberi tanda pada jawaban yang terpilih.

b) Angket terbuka

Angket terbuka yaitu angket yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada responden untuk memberikan jawaban.

Dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan angket yang tergolong langsung dan tertutup. Hal ini didasarkan atas pertimbangan.

1. Memberikan kemudahan untuk menjawab.
2. Tidak banyak menyita waktu dalam mengisi
3. Bagi penelitian lebih mudah dalam menilai atau menganalisis karena telah diberi kunci jawaban atau alternatif jawaban sebelumnya.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa tidak alat penelitian yang 100% mutlak baik, adapun kelemahan penggunaan metode angket adalah ;

- a. Kemungkinan responden memberikan jawaban palsu, tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

- b. Sering sukar untuk menentukan atau memastikan apakah angket dikirim dapat seluruhnya diterima oleh responden
- c. Tidak ada hubungan langsung antara penyebar angket dengan responden, sehingga menimbulkan kemungkinan responden menjawab asal saja.
- d. Sulit bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan yang tepat.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada tersebut, diantaranya bisa di tempuh dengan cara :

1. Pengisian jawaban angket, responden diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas kepada penyebar. Karena berperan sebagai pengawas sekaligus sebagai pengontrol dalam pelaksanaan penyebar.
2. Angket diberikan langsung kepada responden dan pengambilan angket yang telah dijawab dilakukan secara langsung pada waktu itu juga.

D. Instrumen Data

Menurut Sugiono (2013 : 305) instrumen data dalam penelitian kuantitatif yaitu kualitas instrumen yang berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data .

1. Angket Sikap Nasionalisme siswa

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana sikap nasionalisme siswa dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis sejarah. Angket sikap Nasionalisme siswa dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* dan bersifat tertutup yaitu jawabannya sudah disediakan oleh peneliti sehingga responden tinggal memilih dan memberi tanda (\surd) pada jawaban yang sudah tersedia. Dalam penyusunan *kuesioner* telah ditetapkan indikator yang akan menjadikan dasar dalam menyusun pertanyaan dalam *kuesioner* dengan alternative sebagai berikut ini :

Tabel 3.1

Skal Model *Likert*

Skala	Alternative jawaban	Skor nilai
1	S (setuju)	4
2	R (Ragu)	3
3	T (Tidak setuju)	2
4	TMT (Tidak mau tahu)	1

Tabel 3.2

Kisi-Kisi Instrumen Sikap Nasionalisme

Variabel	Indikator	Nomer Item	Jumlah
Sikap siswa	Nasionalisme Persatuan dan kesatuan	1,2,3	3
	Nasionalisme Rela Berkorban	4,5,6	3
	Nasionalisme Cinta Tanah Air	7,8,9	3
	Nasionalisme Bangga Sebagai Bangsa Indonesia	10,11,12	3
	Nasionalisme Kerjasama	13,14,15	3
Jumlah			15

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengelolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa di pahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian (Suharsini Arikunto, 2010 : 200).

Dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian diperlukan adanya suatu teknik analisa, guna menganalisis data kuantitatif dari hasil data angket. Dengan adanya 2 variabel ini, peneliti akan menggunakan dua tahap analisis statistik.

1. Prosentase

Berkaitan dengan penelitian ini yang berkaitan dengan penggunaan pengaruh pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis sejarah terhadap sikap nasionalisme siswa kelas VI MI Thoriqul Huda Sokogunung Kenduruan Tuban tahun pelajaran 2018/2019. Penulis menggunakan rumus prosentase.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} X$$

Keterangan :

P : Angka prosentase

F : Frekuensi yang sedang dicari

N : jumlah Frekuensi atau banyaknya individu standar pengukuran kualitatif

Tabel 3.3

Penafsiran hasil perhitungan prosentase

No.	Prosentase	Keterangan
1.	76%-100%	Baik
2.	56%-75%	Cukup baik
3.	40%-55%	Kurang baik
4.	<40%	Tidak baik

2. Teknik Analisis Product Moment

Dengan menggunakan Product Moment, teknik ini digunakan untuk menjawab permasalahan tentang adakah pengaruh pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis sejarah terhadap sikap nasionalisme siswa kelas VI MI Thoriqul Huda tahun pelajaran 2018/2019. Maka peneliti menggunakan teknik analisis Product Moment dari person yang mana teknik ini sering disebut dengan *Promon* yang mempunyai rumus sebagai berikut :

Tabel 3.4

Intreprestasi product moment

Besarnya nilai “r”	Interprestasi
Antara 0,80 -1,000	Tinggi
Antara 0,60-0,799	Cukup
Antara 0,40- 0,599	Agak rendah
Antara 0,20- 0,399	Rendah
Antara 0,00-0,199	Sangat rendah (tidak berkorelasi)

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisis deskriptif.cara ini digunakan bila data yang diperoleh berupa angka.data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka hasil hitungan statistik diskriptif. (ngalim porwanti, 1987: 13)

Untuk menganalisis tingkat pengaruh sikap siswa setelah proses belajar mengajar dilakukan dengan cara memeberikan berupa soal angket pada setiap akhir pelajaran.

Dalam menganalisis angket tersebut penulis menggunakan teknik statistik dengan rumus korelasi product moment. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

keterangan :

r_{xy} : koefisien korelasi antara x dan y

N : Jumlah Subyek

X : skor item

Y : skor total

$\sum X$: jumlah skor item

$\sum Y$: jumlah skor total

$\sum X^2$: jumlah kuadrat skor item

$\sum Y^2$: jumlah kuadrat skor item